

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN

(STUDI KASUS : KANTOR NOTARIS/P.P.A.T MADE SUMADNYANA S.H)

Oleh

Ni Made Sefyariani Rahayu Putri, NIM 2014101113

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris dalam akad nikah melalui kacamata studi kasus yang melibatkan kantor notaris dan Sumadnyana S.H. Untuk menjamin keamanan hukum atas harta benda baik suami maupun istri, penelitian ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa suatu akta yang sah memberikan perlindungan yang maksimal terhadap suatu perkawinan. Penelitian ini antara lain berkaitan dengan dua (2) rumusan masalah yang berbeda: 1) Di Kota Singaraja, bagaimana tugas notaris dalam akad nikah? 2) Di Kota Singaraja, bagaimana cara notaris menyelesaikan perselisihan akad nikah? Metodologi penelitian yang digunakan disini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris terhadap data. Salah satu hal penting yang dapat diambil dari studi ini adalah perlunya akad nikah bagi pasangan ras campuran, khususnya mereka yang memiliki aset di Indonesia. Bukti terbaik adalah akta otentik. Apabila suatu akad nikah telah dilaksanakan dan dicatat dengan baik, maka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Harta bawaan yang dimiliki sebelum menikah dapat dimasukkan ke dalam perjanjian kawin, bisa dirinci untuk tetap dipisah atau ingin dijadikan harta gono gini/harta bersama. 2) Penyelesaian sengketa perjanjian kawin mutlak dilakukan di kantor pengadilan, dan kapasitas notaris hanya sebagai saksi ahli, dan dipanggil untuk memperlihatkan minuta asli yang ditanda tangani oleh para pihak. Dan kedua pasangan wajib hadir pada saat pembuatan perjanjian kawin.

Kata Kunci : Bentuk, Tanggungjawab, Notaris, Perjanjian Perkawinan

FORM OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR MARRIAGE AGREEMENTS

(CASE STUDY: NOTARY/P.P.A.T OFFICE MADE SUMADNYANA S.H)

By

Ni Made Sefyariani Rahayu Putri, NIM 2014101113

Law Department

ABSTRACT

This study examines the notary's liability in marriage contracts through the lens of a case study involving the notary office and the Sumadnyana S.H. To ensure the legal security of both husband and wife's property, this study is driven by the belief that a valid deed provides the maximum protection for a marriage. Among other things, this study is concerned with two (2) different problem formulations: 1) In Singaraja City, how does the duty of the notary public with respect to the marriage contract come to light? 2) In Singaraja City, how does a notary resolve disputes involving marriage contracts? The research methodology employed here is qualitative. Data collection techniques through document study techniques, observation, and interviews. Qualitative analysis was conducted through an empirical juridical approach to the data. One important takeaway from the study is the need of a marriage contract for mixed-race couples, particularly those with assets in Indonesia. The best proof is an authentic deed. If a marriage contract has been duly executed and recorded, it cannot be revoked under any circumstances. The assets owned before marriage can be included in the marriage agreement, can be detailed to remain separated or want to be used as gono gini / joint assets. 2) Dispute resolution of the marriage agreement is absolutely carried out at the court office, and the capacity of the notary is only as an expert witness, and is summoned to the court.

Keywords: *Form, Responsibility, Notary, the Marriage Covenant*